

ABSTRAKSI

Kelembagaan BKM yang dibentuk melalui kebijakan PNPM mengalami berbagai situasi, disatu sisi keberadaan terus eksis, namun disisi lain BKM juga mengalami permasalahan penyimpangan. Fenomena inilah yang melatarbelakangi dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran ilmiah tentang implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perkotaan dalam mengembangkan kelembagaan masyarakat dengan Research question bagaimanakah implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dalam mengembangkan kelembagaan Masyarakat.

Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Alasan memilih metode penelitian ini, untuk mengungkap secara mendalam implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dalam membangun kelembagaan masyarakat yang dipimpin oleh para relawan. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, untuk menggambarkan secara mendalam tentang suatu fenomena kelembagaan BKM berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PNPM Mandiri Perkotaan telah memnuhi komponen kebijakan publik yang diuraikan dalam teorinya Charles O Jones dan menurut tipologinya PNPM Mandiri Perkotaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku kebijakan dimasyarakat adalah redistributive policy. Keterlibatan unsur-unsur masyarakat dalam membangun BKM mendorong BKM lebih terbuka, namun di sisi lain berpotensi pemahaman yang tidak sama terhadap substansi program.

Atas dasar tersebut maka disarankan implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dapat mentransformasikan konsep yang lebih terbuka kepada masyarakat, untuk menjamin bahwa seluruh pihak yang terlibat mempunyai pemaknaan yang sama terhadap kebijakan PNPM. Metode pendampingan harus dibedakan sesuai perkembangan BKM. Karena BKM mengalami perkembangan akibat dari implementasi kebijakan PNPM Mandiri Perkotaan.

Kata kunci: PNPM, Implementasi, Kelembagaan